



Peran BUMDes Wibawa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Desa Tangkil

Muhamad Ega Sopiullah^{*}, Ahmad Sarbini¹, Rohmanur Aziz²

¹Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

²Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

³Jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : egasopiullah@gmail.com

ABSTRAK

Setiap desa memiliki Badan Usaha Milik Desa masing-masing. BUMDes tentunya mempunyai peran penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat maupun Desa. Salah satu BUMDes yang ada di Indonesia adalah BUMDes Wibawa yang berada di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar belakang berdirinya BUMDes Wibawa Desa Tangkil, dan untuk mengetahui peran BUMDes Wibawa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang BUMDes Wibawa hadir di Desa Tangkil dikarenakan mengikuti anjuran dari pemerintah pusat bahwa setiap desa mendirikan BUMDes untuk meningkatkan pendapatan ekonomi desa dan masyarakat. Peran BUMDes Wibawa dalam mensejahterakan masyarakat, BUMDes Wibawa melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pemuda, pemberdayaan petani, pemberdayaan usaha mikro masyarakat, serta BUMDes Wibawa memiliki unit-unit usaha untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat seperti unit usaha penyewaan alat acara hajatan dan penyewaan alat pembangunan.

Kata Kunci : Peran; BUMDes; Kesejahteraan Sosial.

ABSTRACT

Each village has their own Village Owned Enterprise. BUMDes certainly has a role. One of

the roles of BUMDes is to improve the social welfare of the community and the village. One of the BUMDes in Indonesia is the Wibawa BUMDes in Tangkêl Village. The purpose of this research is to find out the background of the establishment of the Wibawa Village BUMDes, Tangkêl Village, and to find out the role of the Wibawa BUMDes in realizing community welfare. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the background of Wibawa's BUMDes presence in Tangkêl Village was due to following the recommendation from the central government that each village establishes BUMDes to increase the village's and community's economic income. The role of BUMDes Wibawa in the welfare of the community, BUMDes Wibawa conducts community empowerment, such as empowering youth, empowering farmers, empowering community micro-enterprises, and BUMDes Wibawa has business units to increase village and community income such as business units for equipment rental for events and development equipment rental.

Keywords : Role; BUMDes; Social welfare.

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Hal ini senada dengan pendapat bahwa, “berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri (Sandiasa, G., & Widnyani, I. A. P. S., 2017: 64).

Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan tata kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lainnya, tetapi untuk kesejahteraan sosial ini lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangannya yaitu suatu aspek material dan juga spiritual. Kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu terapan, ilmu yang saling meminjam dari ilmu lainnya termasuk ilmu disiplin ekonomi, hukum dan ilmu disiplin lainnya (Fahrudin, A., 2012:45). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Anggraeni, M.R.R.S., 2016:155-168)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan Bumdes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhankebutuhan masyarakat dalam menge-mbangkan usaha (Dewi, A. S. K., 2014:3).

Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa.

Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Subehi, F., et al. (2020:35) adalah sebuah lembaga di desa yang menjalankan fungsi pengelolaan potensi dan aset desa; dan sebagai penyedia layanan usaha bagi masyarakat desa. BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan beragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Pendirian ini di dasarkan atas potensi serta kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat serta didasarkan prinsip-prinsip kooperatif, transparansi dan partisipatif. Dalam pengelolaan BUMDesa dilakukan atas perundang-undangan yang berlaku melalui kesepakatan yang terbangun antar masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, BUMdes dilakukan dengan berbagai macam ragam sesuai potensi, karakteristik lokal serta sumber daya masing-masing desanya. Salah satu desa yang memiliki BUMDes adalah desa Tangkil kecamatan Cidahu kabupaten Sukabumi. BUMDes desa Tangkil ini awalnya sempat berhenti selama satu tahun karena adanya permasalahan di internal BUMDes. Namun setelah adanya perubahan struktur di BUMDes. BUMDes desa Tangkil mulai bergerak kembali. Badan usaha milik desa

(BUMDes) desa tangkil memiliki nama sendiri yaitu BUMDes Wibawa. Adanya peningkatan kinerja BUMDes Wibawa Desa tangkil setelah perubahan struktur. Seperti mulai adanya program kerjasama antara desa dengan bank, kemudian program jasa peminjaman alat seperti *event organizing*. Dengan adanya program tersebut masyarakat desa tangkil merasakan bahwa BUMDes ini bisa membantu dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi serta perbandingan dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, penelitian Aditya, Y. (2018), yang berjudul “Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program BUMDes di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum bisa dikatakan sudah cukup baik. Karena dari awal pembentukan hingga saat ini, BUMDes Harapan Jaya sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, salah satunya bisa dilihat dari adanya pembangunan sebuah gedung kios desa yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyewa untuk membuka usaha. Perbedaan dari penelitian diatas adalah pada penelitian tersebut lebih kepada implementasi atau penerapan sedangkan apada penelitian ini adalah peran BUMDes. *Kedua*, penelitian Khairunnisa, I. (2018), yang berjudul “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Cileunyi wetan Kabupaten Bandung)”. Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan peruntukannya, terlihat dari dibuatkannya kebijakan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan masyarakat, juga dalam proses nya pun sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, dampak yang dihasilkan cenderung positif dari Alokasi Dana Desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dikaji diantaranya yaitu: 1) Apa yang melatar belakangi berdirinya BUMDes Wibawa Desa Tangkil?. 2) Bagaimana peran BUMDes Wibawa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tangkil?.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi serta situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018:155). Metode ini diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peran BUMDes dalam kesejahteraan sosial di masyarakat desa Tangkil kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dan nantinya dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

LANDASAN TEORITIS

Teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu komponen-komponen untuk memecahkan suatu permasalahan, serta dapat mempermudah dalam memahami tujuan atau maksud dari judul penelitian ini. Adapun konsep utama yang dikaji pada penelitian ini diantaranya yaitu: peran, BUMDes, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (Torang, S., 2014:68).

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soekanto, S. 2017:15). Sedangkan menurut Sarwono, S. W. (2002:20), menggunakan teori peran dengan pendekatan *life course*. Artinya, setiap masyarakat memiliki harapan kepada setiap anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu sesuai dengan kategori- kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status. Setiap orang mungkin memiliki sejumlah status dan diharapkan mampu mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek berbeda dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat hak dan kewajiban tersebut. Pendapat ini sejalan dengan pendapat bahwa peranan merupakan pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang kedudukan atau memiliki status tertentu (Taneko, S. B., 1986:220). Menurut Soekanto, S. (2017:200) setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya.

Lembaga sosial sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association*. Institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi ini meliputi

kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri (Wulansari, D., 2013:90-92). Menurut Soekanto, S. (2017), lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. 2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. 3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya.

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Maryunani, 2008:35)

Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES yaitu Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Kamaroesid, H., 2016:2).

Ciri Utama BUMDes dengan Lembaga Ekonomi Komersil lainnya, sebagai berikut: a) Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama; b) Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil); c) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal; d) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar; e) Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa; f) Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa; g) Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota) (Suhu, B., et al., 2020)

Menurut Seyadi (2003:16) indikator peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa yaitu: 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya; 4) Berusaha mewujudkan dan

mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi menurut (Aziz, 2010 : 125) adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya. Selain itu adanya kerja sama yang saling berkesinambungan dengan melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga proses *empowerment* bisa berjalan. Sedangkan pemberdayaan Zubaedi (2013:24) adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, pikomotorik dan afektif dengan penerahan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, A.T., 2004 : 80). Lalu menurut Kuntari, S. (2009 : 13) tujuan akhir dari suatu pemberdayaan masyarakat yaitu harus membuat masyarakat menjadi swadiri, mampu mengurus dirinya sendiri, swadana, mampu membiayai keperluan sendiri, dan swasembada yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara berkelanjutan.

Kesejahteraan merupakan harapan manusia hidup. Kesejahteraan merupakan langkah awal menuju kebahagiaan. Setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda tentang batasan kesejahteraan karena setiap individu atau setiap kelompok manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda satu sama lain terhadap suatu barang atau jasa (Wrihatnolo R. R., & Dwijowiyoto, R.N., 2007:7). Kesejahteraan dapat terlihat dengan seperti berikut: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya; 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan, lingkungan, alam dan sebagainya; 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian, dan sebagainya (Bintarto, 1989:36).

Kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai gambaran tentang keadaan manusia yang serba kecukupan, terpenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, rumah, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan yang lainnya. masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhannya lebih dari yang dibutuhkan atau tidak hanya sekedar untuk bertahan hidup tetapi juga untuk mempermudah, menyenangkan

dan dan meningkatkan secara berkesinambungan. Dengan demikian setiap orang mampu hidup dengan layak sebagai manusia dan mampu mengembangkan bakat yang ada pada dirinya dengan maksimal (Ala, A. B., 1996:42).

Kesejahteraan sosial (masyarakat) didasarkan atas asumsi bahwa masyarakat manusia dapat diorganisasi dan diatur untuk menghasilkan dan memberikan hal-hal ini, dan arena dapat melakukannya, masyarakat mempunyai moral untuk mewujudkannya dengan berhasil. Kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan suatu materi ini bahwa kesejahteraan sosial merupakan ciri yang memberikan gambaran tentang masyarakat Indonesia (Fahrudin, A., 2012:40). Sedangkan menurut Adi, S. R. (2015:5) kesejahteraan sosial merupakan suatu ilmu menerapkan suatu kajian yang mengembangkan suatu kerangka pemikiran dan metodologi, dimana metodologi tersebut bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas hidup terhadap masyarakat yang melalui suatu pengelolaan dalam suatu masalah sosial, dimana hal tersebut merupakan sebagai pemenuhan hidup untuk masyarakat serta dapat memaksimalkan suatu kesempatan pada sekelompok masyarakat maupun anggota masyarakat agar dapat berkembang

Kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu: 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok-pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya; 2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, A., 2012:10).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Desa Tangkil secara geografis berada 59 C LS dan 65 C LU, dilihat dari geografi ketinggian wilayah Desa Tangkil berada pada 500 m dari permukaan laut dengan keadaan curah hujan rata-rata normal.mm / tahun serta suhu rata-rata 35 C. Secara Administrasi Desa Tangkil terletak di wilayah Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa barat. Wilayah Desa Tangkil secara Administrasi dibatasi oleh wilayah Desa-desanya tetangga, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cisaat Kecamatan Cicurug, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jayabakti Kecamatan Cidahu, disisi Timur berbatasan dengan Desa Babakanpari dan Desa Caringin Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Cicurug sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girijaya Kecamatan Cidahu.

Visi dari Desa Tangkil yaitu: Mewujudkan masyarakat Kabupaten ukabumi, yang berakhlak mulia, maju dan sejahtera. Dengan Misi : 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia; 2) Mewujudkan tata kelola

Pemerintahan yang bersih dan berkemampuan memajukan masyarakat; 3) Membangun perekonomian yang tangguh, berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan.

Kondisi masyarakat desa Tangkil kurang lebih 3 tahun terakhir ini banyak mengalami gejala ekonomi di beberapa daerah tertentu, terutama di daerah atau perkampungan yang ada perusahaan industrinya dalam hal ini adalah pabrik, Pemerintah Desa Tangkil sampai saat ini masih melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut lewat kebijakan pembangunan ekonomi yang dikerjasamakan dengan beberapa pihak terkait. Hal ini tentu dianggap baik oleh kelompok masyarakat yang terdampak atau kelompok masyarakat yang secara ekonomi tarafnya sangat rendah.

Skema atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa beserta dengan Lembaga Desa terutama BUMDes yaitu melakukan kolaborasi dan sistem kemitraan dimana Desa merupakan representasi masyarakat mendapatkan hak istimewa dari perusahaan untuk memilih anggota masyarakat yang membutuhkan peningkatan ekonomi atau pekerjaan. Sederhanya Desa diberikan keleluasaan untuk merekomendasikan masyarakatnya agar bisa bekerja dan membantu peningkatan ekonomi.

Disisi lain, masyarakat desa Tangkil memiliki karakteristik yang cukup instan dalam memandang segala persoalan ekonomi, artinya masyarakat desa Tangkil selalu menihilkan proses yang harus dilalui terlebih dahulu. Tentu hal demikian tidak berangkat dari ruang yang kosong, bisa dikatakan dengan sederhana bahwa hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat untuk membangun ekonomi gotong royong dan ekonomi mandiri sangat kurang. Selain itu juga kondisi tersebut diperparah dengan adanya Covid-19 yang telah meluluh lantakkan segala sector ekonomi.

Sehingga masyarakat desa Tangkil sangat bergantung kepada lembaga pemerintah desa, hal tersebutlah yang mendorong untuk setiap lembaga-lembaga desa diharuskan mampu mengelaborasi setiap potensi ekonomi masyarakat. Masyarakat desa Tangkil yang mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh industry ketika dihadapkan pada persoalan demikian dan dihadapkan pula dengan adanya virus Covid-19 ini fakta dilapangan mengatakan bahwa banyak buruh-buruh industry yang dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, untuk mengurangi tingkat depresi masyarakat karena menghadapi situasi yang serba sulit, pemerintah desa dan lembaga desa terkait banyak mengadakan pelatihan berbasis teknologi untuk pemuda dan kursus menjahit untuk Ibu Rumah Tangga serta pelatihan kewirausahaan atau berdagang untuk Kepala Rumah Tangga.

Pelatihan dan kursus tersebut bermuara pada satu hal yaitu masyarakat desa Tangkil didorong untuk memiliki skill dan soft skill untuk memperkuat basis perekonomian masyarakat dan mampu mengelaborasi potensi dirinya sendiri yang pada akhirnya akan menciptakan suatu iklim ekonomi masyarakat yang mandiri dan tidak tergantung kepada pihak manapun. Pelatihan-pelatihan yang telah diadakan oleh desa tersebut sedikit banyaknya menjadikan masyarakat sadar akan potensi yang dimilikinya selamanya ini.

Latar Belakang Berdirinya BUMDes Wibawa Desa Tangkil

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Maryunani, 2008:35). Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa. Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat.

BUMDes berperan menjadi pilar kegiatan perekonomian di desa yang memiliki fungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Lembaga sosial yaitu berperan sebagai tata cara atau prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar-manusia yang berkelompok dalam suatu kelompok kemasyarakatan yang dinamakan *association*. Institusi-institusi sosial pada hakikatnya adalah kumpulan dari norma-norma sosial (struktur-struktur sosial) yang telah diciptakan untuk melaksanakan fungsi masyarakat. Institusi ini meliputi kumpulan norma-norma dan bukan norma-norma yang berdiri sendiri-sendiri (Wulansari, D., 2013:90-92). BUMDes dikatakan sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal yang dimiliki baik berupa barang maupun jasa.

Awal mula berdirinya BUMDes Wibawa desa Tangkil diketahui bahwa BUMDes Wibawa desa Tangkil ini dikarenakan anjuran dari pemerintah pusat, dan adanya dorongan dari masyarakat yang membutuhkan suatu lembaga atau badan yang mengurus usaha desa, potensi desa, dan mengelola hasil pertanian desa. Tujuan didirikannya BUMDes Wibawa yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tangkil. Selaras dengan pendapat Bintarto

(1989:36) bahwa kesejahteraan dapat terlihat dengan seperti berikut: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya; 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan, lingkungan, alam dan sebagainya; 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian, dan sebagainya. BUMDes Wibawa merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi yang sudah berdiri sejak tahun 2010. BUMDes Wibawa ini memiliki berbagai bidang usaha seperti pengelolaan air bersih, bank sampah, peternakan dan juga pertanian. Usaha utama yang dikelola oleh BUMDes Wibawa yaitu usaha penyewaan alat bangunan.

Faktor pendukung ialah suatu hal atau kondisi yang dapat mendukung atau menumbuhkan suatu kegiatan atau program (Effendy, O.U., 2008). Faktor pendukung dari latar belakang berdirinya BUMDes Wijaya yaitu: 1) Komitmen Pemerintah, Peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat Desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya Ekonomi Nasional ditopang kokoh oleh perekonomian Desa yang kokoh dan terarah, komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan BUMDes dibuktikan dengan pemberian dana dalam usaha mengembangkan BUMDes; 2) Tersedianya potensi Sumber Daya Alam, banyak cara untuk mengembangkan ekonomi Desa, salah satunya adalah melalui pemanfaatan aset Desa sebagai potensi Desa. Desa memiliki aset-aset asli desa yang dapat berbentuk tanah, kolam, sumber mata air ataupun sumber daya alam lainnya.

Faktor penghambat dari latar belakang berdirinya BUMDes Wijaya yaitu: 1) Rundahnya kualitas SDM, kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan kurangnya peningkatan terhadap kemajuan suatu organisasi. SDM yang ada dalam sebuah organisasi memiliki peranan yang sangat penting baik dalam merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian atas kerja, pengembangan dan sebagainya; 2) Intervensi dari pemerintah Desa, sejak berdirinya BUMDes intervensi dari pemerintah desa sangat besar yang berakibat terhadap daya kreatif dan inovatif bagi pengelola BUMDes sehingga efektivitas dari pengelolaan BUMDes yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan terhambat; 3) Faktor anggaran, adanya potensi Desa Tangkil yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

Pemanfaatan Sumber Daya Manusia, Menurut Sutrisno, E. (2011) potensi SDM berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Pada pelaksanaannya dalam mengembangkan SDM yang ada, tentunya harus melalui pelatihan dan juga pengembangan karir. Sastradipoera (2006: 21) menjelaskan

bahwa pelatihan yaitu suatu proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan sikap dan kepribadian. Pendekatan pemanfaatan SDM digunakan untuk mencari SDM yang kompeten dalam menjalankan dan mengelola BUMDes. Pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam pemanfaatan SDM sudah dijalankan, meskipun SDM yang terlibat didalam pengelolaan BUMDes belum mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan BUMDes. Dengan demikian, perlu adanya sebuah pelatihan terhadap SDM yang terlibat didalam BUMDes agar mampu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam mengelola BUMDes Wibawa Desa Tangkil.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Zaman, et al. (2021) mengemukakan bahwa Sumber Daya Alam adalah setiap komponen yang ada di permukaan bumi yang ditemukan, dikelola, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk kelangsungan hidupnya. Untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam dilakukan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan dari berbagai potensi alam yang ada. Mayoritas penduduk yang ada di Desa Tangkil bekerja sebagai petani dan memenuhi kebutuhannya dari hasil pertanian. BUMDes dapat membantu masyarakat dalam memasarkan hasil pertaniannya yaitu menjadi jembatan perantara antara masyarakat dan pihak pasar. Namun pada pelaksanaannya BUMDes Wibawa Desa Tangkil belum melaksanakan kegiatan pendekatan ini. Pelaksanaan pemasaran hasil pertanian masyarakat dilakukan secara pribadi tanpa adanya pemihakan dari pengelola BUMDes dalam memasarkan hasil pertanian masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan sumber yaitu pemanfaatan SDM dan SDA yang dijalankan oleh BUMDes Wibawa belum mampu memberikan efek atau belum efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendekatan ini belum efektif karena pengelolaan BUMDes yang belum maksimal karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM yang ada dalam BUMDes, sehingga perlu diadakan pelatihan agar mampu mengelola setiap potensi dari hasil kegiatan usaha masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepasar.

Peran BUMDes Wibawa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BUMDes Wibawa di Desa Tangkil memiliki manfaat yang baik dan berperan penting bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Tangkil. Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. (Soekanto, S., 2017:200). Meskipun untuk saat ini perannya masih sangat rendah di masyarakat,

tetapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran.

Secara lebih rinci potensi desa dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Potensi Fisik, Potensi fisik adalah potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa; 2) Potensi Nonfisik, Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri (Soleh, A., 2017 : 36). Potensi Desa yang ada menjadi penguat unit usaha yang dikelola BUMDes Sejahtera berdampak positif bagi masyarakat di Desa Tangkil. Pemberdayaan adalah kunci dalam membangun kesadaran masyarakat Desa secara aktif untuk mewujudkan kemandirian.

Terdapat satu transformasi sosial-ekonomi yang cukup signifikan dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sudariyanto (2019) sosial-ekonomi adalah semua hal yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti sandang, pangan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu, transformasi tersebut bisa dipastikan karena adanya pengaruh dari proses pembangunan yang sangat akseleratif, sehingga membuat BUMDes harus selalu melakukan inovasi untuk menarik simpati dan perhatian pada masyarakat. BUMDes Wibawa memiliki peran penting terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tangkil. Badan Usaha Milik Desa Tangkil yang bernama BUMDes Wibawa ini melakukan peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu desa dalam menambahkan pendapatan Desa Tangkil, dan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemuda, dan petani. Adapun peran BUMDes Wibawa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada beberapa aspek yaitu:

Pertama, aspek ekonomi. Menurut Mardikanto, T., & Soebianto, P (2012 : 125) hakikat dari pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemandirian serta taraf hidup masyarakat. BUMDes telah memberikan peluang usaha bahkan menciptakan sejenis usaha bagi masyarakat desa Tangkil, seperti usaha kios BRI Link, dan distribusi masyarakat yang telah dibina ke beberapa perusahaan swasta yang telah bekerja sama sebelumnya. Selain itu, untuk meningkat potensi ekonomi masyarakat BUMDes mulai mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat desa Tangkil. Selanjutnya, BUMDes mulai menggerakkan masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang merata agar tidak terjadi kesenjangan di masyarakat desa. Dampak tersebut dipandang oleh beberapa tokoh masyarakat desa merupakan bagian dari dampak positif berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wibawa yang senantiasa secara

intens terus berinovasi dan bertransformasi untuk memberikan peluang usaha yang terbaik bagi masyarakat desa Tangkil. Pada akhirnya masyarakat merasa bahwa kehadiran BUMDes di desa Tangkil sedikit banyak telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan perhatian lebih terutamanya kepada kelompok masyarakat yang terkategori sangat membutuhkan.

Kedua, aspek sosial. Menurut pendapat Santoso, E. J. (2010) aspek sosial merupakan hubungan dengan masyarakat, kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Dalam mencapai pemenuhan aspek kepentingan sosial adalah penting diperhatikan untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan. Dengan keberadaan BUMDes yang sekarang memiliki banyak nasabah, hal tersebut menjadikan masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga keadaan tersebut mampu menciptakan relasi sosial yang terhubung. Tentu fakta ini bernilai positif untuk BUMDes karena memudahkan BUMDes untuk mengorganisir dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Disamping itu, BUMDes juga bisa menggerakkan masyarakat khususnya nasabah untuk senantiasa menjaga stabilitas sosial agar tidak terjadi konflik horizontal antar masyarakat desa. Kemudian, BUMDes juga bisa menggunakan nasabah untuk menarik masyarakat lainnya agar ikut bergabung dalam kelompok usaha yang dibina oleh BUMDes itu sendiri. Pada aspek sosial ini, intinya adalah kehadiran BUMDes menjadikan masyarakat desa memiliki kepekaan yang tinggi dan mempunyai nilai-nilai kebersamaan.

Ketiga, aspek agama. Alim, M. (2011) mengemukakan bahwa agama terdiri dari seperangkat ajaran yang merupakan perangkat nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan barometer parapemeluknya dalam menentukan pilihan tindakan dalam kehidupannya. Pada aspek agama ini sebetulnya BUMDes hanya berkerjasama dengan para tokoh agama di desa Tangkil agar memberikan pembinaan kepada masyarakat terutama lapisan masyarakat terbawah supaya dimotivasi dan dorong agar mereka bisa melewati setiap fase kehidupan yang tidak mereka terima semestinya. Menurut pendapat Sarbini, A. (2010) kehadiran pembinaan agama dipandang cukup memberi arti penting bagi penyebaran dan pembinaan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Sebab, sekalipun keberadaannya terbatas pada kelompok-kelompok kecil, namun kegiatannya langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan pembinaan agama Islam. Secara singkat bisa dijelaskan bahwa, BUMDes memberikan kepercayaan pada tokoh agama desa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa untuk senantiasa meningkatkan kualitas kehidupan yang islami. Sehingga masyarakat mulai memiliki kesadaran bahwa pentingnya saling membantu dan berpartisipasi untuk kemaslahatan bersama.

Menurut Seyadi (2003 : 16) indikator peranan BUMDes terhadap

peningkatan perekonomian desa yaitu: 1) Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya; 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 5) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian BUMDes Wibawa Desa Tangkil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga telah sesuai sebagai mana indikator peranan BUMDes yang telah disebutkan diatas bahwa peran BUMDes itu adalah :

Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Pada kasus ini BUMDes Wibawa telah disebutkan bahwa meningkatkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa dengan memasarkan produk-produk masyarakat desa serta menggali potensi tanaman yang cocok untuk Desa Tangkil yang memiliki nilai jual yang bagus.

Kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. BUMDes Wibawa dalam peran ini mereka melakukan pemberdayaan kepada pemuda agar mereka bisa bermanfaat di masyarakat seperti pelatihan kerja, kemudian adanya pemberdayaan petani, serta pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan usaha mikro.

Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Badan Usaha Milik Desa sebagai pondasinya. BUMDes wibawa menjadi Pondasi dalam memasarkan produk-produk masyarakat desa ke luar Desa baik dengan online shop ataupun dengan distribusi ke pasar-pasar terdekat Desa Tangkil.

Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes Wibawa dalam melakukan peran keempat ini, mereka memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa yang memiliki usaha mikro untuk memiliki BRI LINK, melakukan pemasaran online, dan memberitahukan cara terkait top-up dompet online seperti Shopee-pay dan sejenisnya.

Kelima, membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat. BUMDes Wibawa dalam melakukan peran yang kelimanya ini mereka melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terkait peningkatan ekonomi melalui pertanian ataupun usaha mikro di desa, serta BUMDes membuat beberapa unit usaha untuk

meningkatkan pendapatan desa seperti unit usaha penyewaan acara hajatan dan penyewaan alat-alat bangunan.

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka peran BUMDes Wibawa dalam mensejahterakan masyarakat sudah sesuai dengan konsep peran BUMDes, yang mana BUMDes ini terbentuk dengan adanya kebijakan dari pemerintah agar bisa meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa dan BUMDes telah melakukan peran sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Tangkil Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi. Peneliti mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan Undang-Undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa. Awal mula berdirinya BUMDes Wibawa desa Tangkil diketahui bahwa BUMDes Wibawa desa Tangkil ini dikarenakan anjuran dari pemerintah pusat, dan adanya dorongan dari masyarakat yang membutuhkan suatu lembaga atau badan yang mengurus usaha desa, potensi desa, dan mengelola hasil pertanian desa. Faktor pendukung dari latar belakang berdirinya BUMDes Wijaya yaitu: 1) Komitmen Pemerintah; 2) Tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Faktor penghambat dari latar belakang berdirinya BUMDes Wijaya yaitu: 1) Rundahnya kualitas SDM; 2) Intervensi dari pemerintah Desa; 3) Faktor anggaran. Pendekatan sumber yaitu pemanfaatan SDM dan SDA yang dijalankan oleh BUMDes Wibawa belum mampu memberikan efek atau belum efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pendekatan ini belum efektif karena pengelolaan BUMDes yang belum maksimal karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan SDM yang ada dalam BUMDes, sehingga perlu diadakan pelatihan agar mampu mengelola setiap potensi dari hasil kegiatan usaha masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepasar.

BUMDes Wibawa di Desa Tangkil memiliki manfaat yang baik bagi keberlangsungan hidup penduduk Desa Tangkil meskipun untuk saat ini perannya masih sangat rendah di masyarakat. Tetapi walaupun perannya masih rendah tapi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi tingkat pengangguran. Adapun peran BUMDes Wibawa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pada beberapa aspek yaitu: 1) aspek ekonomi, masyarakat merasa bahwa kehadiran BUMDes di desa Tangkil sedikit banyak telah mampu meningkatkan ekonomi masyarakat dan memberikan

perhatian lebih terutamanya kepada kelompok masyarakat yang terkategori sangat membutuhkan; 2) aspek sosial, intinya adalah kehadiran BUMDes menjadikan masyarakat desa memiliki kepekaan yang tinggi dan mempunyai nilai-nilai kebersamaan; 3) aspek agama. Pada aspek agama ini sebetulnya BUMDes hanya berkerjasama dengan para tokoh agama di desa Tangkil agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka bisa melewati setiap fase kehidupan yang tidak mereka terima semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. R. (2015). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagraindo Persada.
- Aditya, Y. (2018). *Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Lumbungsari Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ala, A. B. (1996). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty Office.
- Alim, M. (2011). *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anggraeni, M.R.R.S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modus*. Vol. 28. No. 2.
- Aziz, R. (2010). Dakwah Dalam Paradigma Pemberdayaan Masyarakat Muslim. Ilmu Dakwah: *Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(16), 117-142.
- Bintarto. (1989). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of rural and development*, 5(1).
- Effendy, O.U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fahrudin, A. (2012) *Kesejahteraan Sosial Internasional*. Bandung: Alfabeta.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Khairunnisa, I. (2018). *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Deskriptif di Desa Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung*. Skripsi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kuntari, S. (2009). *Strategi Pemberdayaan Quality Growth dalam Melawan Kemiskinan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sandiasa, G., & Widnyani, I. A. P. S. (2017). Kebijakan penguatan lembaga

- pemberdayaan dalam meningkatkan partisipasi pemberdayaan masyarakat di perdesaan. *Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 8, 64-78.
- Santoso, E. J. (2010). *Life balance ways*. Elex Media Komputindo.
- Sarbini, A. (2010). Internalisasi nilai keIslaman melalui majelis taklim. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(16), 53-70.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sastradipoera. (2006). *Pengembangan dan Pelatihan: Suatu Pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Kappa-Sigma.
- Seyadi. (2003). *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN.
- Soekanto, S. (2017). *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soleh, A. (2017). Strategi pengembangan potensi desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 32-52.
- Subehi, F., Luthfi, A., Mustofa, M. S., & Gunawan, G. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara*, 3(1), 34-43.
- Sudariyanto. (2019). *Memahami Interaksi Sosial*. Semarang: Alprin.
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhu, B., Djae, R. M., & Sosoda, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago-Jgoa*, 1(1).
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model - model Pemberdayaan*, Gaya Media, Yogyakarta.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Taneko, S. B. (1986). *Konsepsi System Sosial Dan System Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Wrihatnolo R. R., & Dwijowiyoto, R.N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Komputer Indo.
- Wulansari, D. (2013). *Sosiologi Konsep dan Teori*. Bandung: Refika Aditama.
- Zaman, N., Syafrizal, S., Chaerul, M., Purba, S., Bachtiar, E., Simarmata, H. M. P., & Hastuti, P. (2021). *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Kencana.